

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Semester I Tahun 2025

Jl. Raya Mojosari No. 77 Kepanjen

Malang - Jawa Timur

Telp. 0341 - 399192 Fax. 0341 – 399192

e-mail : keuangan.pakabmalang@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Untuk Periode Semester I Tahun 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Mojosari No. 77 Kepanjen

Malang - Jawa Timur

Telp. 0341 - 399192 Fax. 0341 - 399192

e-mail : keuangan.pakabmalang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah salah satu Entitas Akuntansi di yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kab. Malang, 30 Juni 2025
Sekretaris
Pengadilan Agama Kabupaten Malang,



ROHMAD BAHRUDIN
NIP. 19820205 200604 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
RINGKASAN	ix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	xi
NERACA	xii
LAPORAN OPERASIONAL	xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
A. PENJELASAN UMUM.....	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4. Basis Akuntansi	5
A.5. Dasar Pengukuran	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	13
B.1 Pendapatan	13
B.2 Belanja.....	14
B.3 Belanja Pegawai	Error! Bookmark not defined.
B.4 Belanja Barang.....	16
B.5 Belanja Modal.....	16
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17
B.5.3 Belanja Modal Lainnya	18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	21

C.1. Aset Lancar	21
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	21
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	21
C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>).....	Error! Bookmark not defined.
C.1.4. Piutang Bukan Pajak	Error! Bookmark not defined.
C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	Error! Bookmark not defined.
C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Error! Bookmark not defined.
C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Error! Bookmark not defined.
C.1.8. Persediaan	22
C.2. Aset Tetap	22
C.2.1. Tanah	22
C.2.2. Peralatan dan Mesin	31
C.2.3. Gedung dan Bangunan	Error! Bookmark not defined.
C.2.4. Aset Tetap Lainnya	31
C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Error! Bookmark not defined.
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	32
C.3. Aset Lainnya	32
C.3.1. Aset Tak Berwujud.....	33
C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	Error! Bookmark not defined.
C.3.3. Aset Lain-Lain.....	33
C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	34
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	35
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga.....	35
C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan	35
C.4.3. Hibah yang Belum Disahkan.....	36
C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka	36
C.4.5. Uang Muka dari KPPN	36

C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya	Error! Bookmark not defined.
C.5 Ekuitas	36
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	43
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	43
D.2 Beban Pegawai.....	43
D.3 Beban Persediaan	44
D.4 Beban Barang dan Jasa	44
D.5 Beban Pemeliharaan	45
D.6 Beban Perjalanan Dinas	45
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	46
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	47
D.9 Kegiatan Non Operasional	47
D.10 Pos Luar Biasa	48
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	56
E.1 Ekuitas Awal.....	56
E.2 Surplus/Defisit LO.....	56
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	56
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset	56
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan	56
E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi	56
E.4.4 Selisih Revaluasi Aset.....	57
E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	57
E.4.6 Koreksi Lain-lain.....	57
E.5 Transaksi Antar Entitas.....	57
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	Error! Bookmark not defined.
E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk	Error! Bookmark not defined.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung **Error!**

Bookmark not defined.

E.6 Ekuitas Akhir 58

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 58

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 58

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI..... 58

F.3. Pengungkapan Lain-Lain..... 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	13
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPNBP Per 30 Juni 2025 dan 2024	14
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025	14
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 dan 2024	15
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2025 dan 2024	16
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 2024	16
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2025 dan 2024	17
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2025 dan 2024	17
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024	18
Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024	21
Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024	21
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14. Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15. Rincian Penyetoran Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 16. Mutasi Piutang Bukan Pajak	Error! Bookmark not defined.
Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 18. Rincian Jumlah Debitur dan Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 19. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 20. Rincian Persediaan	22
Tabel 21. Mutasi Transaksi Tanah	22
Tabel 22. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 23. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin	31

Tabel 24. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	31
Tabel 26. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 27. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	32
Tabel 28. Mutasi Aset Tak Berwujud.....	33
Tabel 29. Mutasi Aset Lain-Lain	34
Tabel 30. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	34
Tabel 31. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	35
Tabel 32. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	Error! Bookmark not defined.
Tabel 33. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan 2024.....	43
Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2024	44
Tabel 35. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 2024	44
Tabel 36. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 dan 2024	45
Tabel 37. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 dan 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 38. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 dan 2024	46
Tabel 39. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 2024	46
Tabel 40. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 30 Juni 2025 dan 2024	47
Tabel 41. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2025 dan 2024	48
Tabel 42. Rincian Koreksi Lainnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 43. Rincian Transaksi Antar Entitas.....	57
Tabel 44. Rincian Transfer Keluar	Error! Bookmark not defined.
Tabel 45. Rincian Transfer Masuk.....	Error! Bookmark not defined.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Raya Mojosari No. 77 Kabupaten Malang - 65163

Telp. 0341-399192 Fax. 0341-399194, e-mail: pa.kab.malang@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester I Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kab. Malang, 30 Juni 2025
Sekretaris
Pengadilan Agama Kabupaten Malang,



ROHMAD BAHRUDIN
NIP. 19820205 200604 1 005

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 355.231.500,00 atau mencapai 48,23% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 736.611.000,00.

Realisasi Belanja Negara Semester I Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 45.342.350,00 atau mencapai 26,26% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 172.650.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.038.444.289,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 1.038.444.289,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1.005.808.000,00 dan Rp. 32.636.289,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 355.231.500,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp. 53.650.350,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 301.581.150,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp. 301.581.150,00 dan Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. 301.581.150,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 22.605.289,00 dikurangi surplus/defisit-LO sebesar Rp. 301.581.150,00, ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp. 10.031.000,00, kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain sebesar (Rp. 0,00) dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp. 291.550.150,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp. 32.636.289,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025			TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
Pendapatan	B.1	736.611.000,00	355.231.500,00	48	876.309.000,00	342.109.000,00	39
Jumlah Pendapatan		736.611.000,00	355.231.500,00	48	876.309.000,00	342.109.000,00	39
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	B.4	172.650.000,00	45.342.350,00	26	185.858.000,00	106.656.000,00	57
Belanja Modal	B.5	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja		172.650.000,00	45.342.350,00	26	3.666.164.077.000,00	1.691.002.349.348,00	46

NERACA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

NERACA

PER 30 Juni 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
Aset Lancar	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	10.000.000,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.2	995.808.000,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1.3	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C. 1.4	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 1.5	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.6	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C. 1.7	0,00	0,00
Persediaan	C. 1.8	32.636.289,00	22.605.289,00
Jumlah Aset Lancar		1.038.444.289,00	22.605.289,00
Aset Tetap	C. 2		
Tanah	C. 2.1	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C. 2.2	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	C. 2.3	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C. 2.4	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 2.5	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C. 2.6	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		0,00	0,00
ASET LAINNYA	C. 3		
Aset Tak Berwujud	C. 3.1	0,00	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C. 3.2	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	C. 3.3	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 3.4	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		1.038.444.289,00	22.605.289,00
Kewajiban Jangka Pendek	C. 4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.1	995.808.000,00	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 4.2	0,00	0,00
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C. 4.3	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 4.4	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C. 4.5	10.000.000,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C. 4.6	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.005.808.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.005.808.000,00	0,00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	32.636.289,00	22.605.289,00
JUMLAH EKUITAS		32.636.289,00	22.605.289,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.038.444.289,00	22.605.289,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	355.231.500,00	342.109.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		355.231.500,00	342.109.000,00
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	13.958.000,00	13.731.505,00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	37.127.350,00	50.658.000,00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	-	-
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	2.565.000,00	50.340.000,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	-	-
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	0,00
JUMLAH BEBAN		53.650.350,00	114.729.505,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		301.581.150,00	227.379.495,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	161.398.176,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	(161.398.176,00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	-
POS LUAR BIASA	D. 10	0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		301.581.150,00	227.379.495,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	22.605.289,00	18.774.048,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	301.581.150,00	227.379.495,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	0,00	0,00
Lain-lain	E. 4.6	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 5	(291.550.150,00)	(212.476.061,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		10.031.000,00	14.903.434,00
EKUITAS AKHIR	E. 6	32.636.289,00	33.677.482,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar
Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kabupaten Malang

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Malang*

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mahkamah Agung Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, dan juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mahkamah Agung menetapkan visi sebagai berikut :

"MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG".

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mahkamah Agung yang mengelola *man, money, dan material* Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya mempunyai peran yang sangat penting mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
2. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai peranan utama dalam membangun opini Mahkamah Agung khususnya dibidang pelaporan keuangan dan aset;
3. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mahkamah Agung disamping mempunyai fungsi melakukan koordinasi, pembinaan dan juga pelaksanaan perencanaan pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan keprotokolan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi:

1. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana dan lain-lain;
2. Adanya Kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran, dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan Peradilan;
3. Adanya dukungan dari berbagai pihak (termasuk luar negeri/lembaga donor).

Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatkan kelembagaan/organisasi dan tata laksana peradilan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai;

5. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan;
6. Meningkatkan penatausahaan aset negara;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.

Tujuan

Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan maka tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah:

1. Terwujudnya dukungan *man, money, dan material* atas tugas fungsi utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
2. Terlaksananya layanan rumah tangga Mahkamah Agung sesuai dengan indikator tujuan.

Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan, dan BMN yang akuntabel;
3. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
4. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point, single database, multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan

Agama Kabupaten Malang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan
Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	--	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester I Tahun 2024 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 736.611.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Rincian Perubahan DIPA**Tahun Anggaran 2025**

(dalam Rupiah)

Uraian	PER 30 JUNI 2025	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	736.611.000,00	736.611.000,00
Jumlah Pendapatan	736.611.000,00	736.611.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	172.650.000,00	172.650.000,00
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	172.650.000,00	172.650.000,00

B.1 Pendapatan**Realisasi****Pendapatan**

Rp355.231.500,00.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 355.231.500,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 736.611.000,00. Pendapatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN serta Pendapatan Lain-Lain.

Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	PER 30 JUNI 2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4251	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	736.611.000,00	355.231.500,00	48,23
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan Bruto		736.611.000,00	355.231.500,00	48,23
Pengembalian		0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		736.611.000,00	355.231.500,00	48,23

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA SEMESTER I TAHUN 2024

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.122.500,00 atau 3.84% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2024. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya Pendapatan Uang Leges, Kejaksaan dan Peradilan lainnya.

Perbandingan realisasi PNPB 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

KODE	Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	355.231.500,00	342.109.000,00	13.122.500,00	3,84
425232	Pendapatan Uang Leges	6.840.000,00	6.810.000,00	30.000,00	0,44
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	127.415.000,00	121.300.000,00		—
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	220.976.500,00	213.999.000	6.977.500,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Brute	355.231.500,00	342.109.000,00	13.122.500,00	3,84
	Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Netto	355.231.500,00	342.109.000,00	13.122.500,00	3,84

B.2 Belanja

Realisasi

Belanja Rp

172.650.000,00.

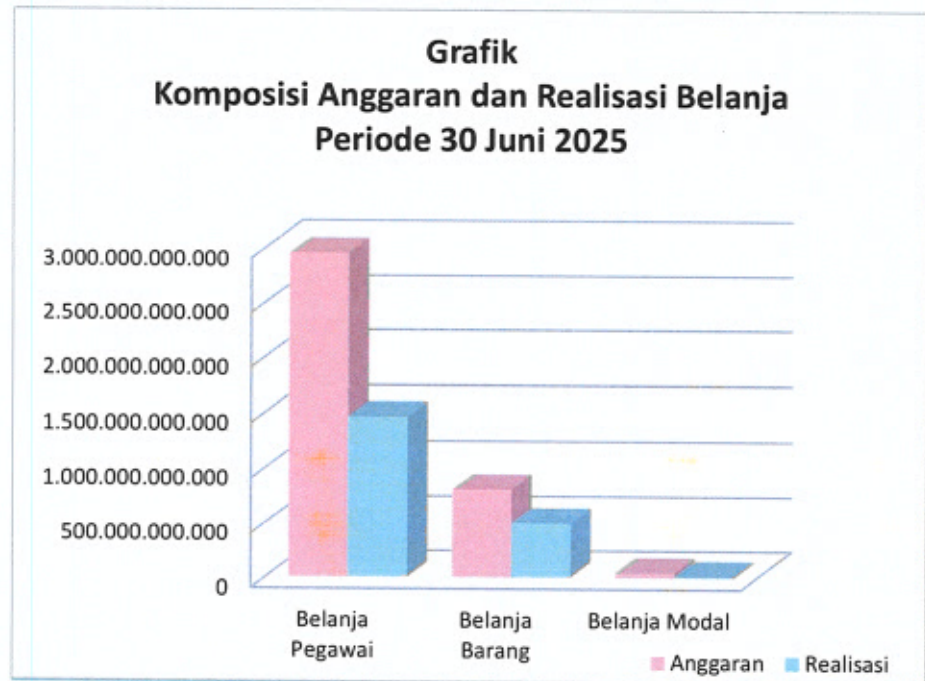
Realisasi Belanja Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp172.650.000,00 atau 26.26% dari anggaran belanja sebesar Rp172.650.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
52	Belanja Barang	172.650.000,00	45.342.350,00	26,26
53	Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		172.650.000,00	45.342.350,00	26,26
Pengembalian		0,00	(61.439.822,00)	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		172.650.000,00	(16.097.472,00)	-9,32

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp61.313.650,00 atau sebesar (57.49)% dibandingkan realisasi periode TA 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- Belanja Barang

Menurunnya Belanja Barang dikarenakan berkurangnya perjalanan dinas .

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	#DIV/0!
52	Belanja Barang	45.342.350,00	106.656.000,00	(61.313.650,00)	(57,49)
53	Belanja Modal	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Transaksi Kas		45.342.350,00	106.656.000,00	(61.313.650,00)	(57,49)

Belanja
Pegawai
Rp0,00

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp45.342.350,0
0

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp45.342.350,00 dan Rp106.656.000,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan Rp61.313.650,00 atau sebesar (57.49)% dibandingkan realisasi periode TA 2024.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	65.000,00	-	65.000,00	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional	-	820.000,00	(820.000,00)	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	5.650.000,00	5.658.000,00	(8.000,00)	(0,14)
Belanja Jasa	37.062.350,00	49.838.000,00	(12.775.650,00)	(25,63)
Belanja Pemeliharaan	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.565.000,00	50.340.000,00	(47.775.000,00)	(94,90)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	45.342.350,00	106.656.000,00	(61.313.650,00)	(57,49)
Pengembalian	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Netto	45.342.350,00	106.656.000,00	(61.313.650,00)	(57,49)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal tidak mengalami penambahan/penurunan dikarenakan tidak terdapat anggaran :

Tabel 6. Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA SEMESTER I TAHUN 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	0,00	-	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	#DIV/0!

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat kenaikan/penurunan atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan periode 30 Juni 2023. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja
Modal Gedung
dan Bangunan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya.

Rp0,00 Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0,00	24.576.540.000,00	(24.576.540.000,00)	(100,00)
Realisasi Belanja Bruto	0,00	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	0,00	-	-	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1. Aset Lancar**

Aset Lancar Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.038.444.289,00 dan Rp22.605.289,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 10. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Saldo UP	10.000.000,00	0,00
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
3	Saldo TUP	0,00	0,00
4	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
Jumlah		10.000.000,00	0,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 11. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Belanja yang masih harus dibayar/utang pihak ketiga yang masih berada di rekening bank bendahara	995.808.000,00	0,00
2	Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor	0,00	
Jumlah		995.808.000,00	0,00

Persediaan**C.1.8. Persediaan**

Rp32.636.289,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp32.636.289,00 dan Rp22.605.289,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	Mutasi	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	32.636.289,00	(30.371.000,00)	2.265.289,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
	Jumlah	32.636.289,00	(30.371.000,00)	2.265.289,00

C.2. Aset TetapAset Tetap
Rp0,00

Nilai Aset Tetap Pengadilan Agama Kabupaten Malang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.2.1. TanahTanah
Rp0,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Kabupaten Malang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Tahun 2024.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13. Mutasi Transaksi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	0,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp0,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Transfer Masuk	0,00
Hibah Masuk	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00

Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya Rp43.156.668.204,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp43.156.668.204,00 dan Rp43.156.668.204,00.

Rp43.156.668.204,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada periode Semester I Tahun 2024.

Tabel 15. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA SEMESTER I TAHUN 2024

Saldo per 31 Desember 2023	43.156.668.204,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2024	43.156.668.204,00
Akumulasi Penyusutan	(151.124.216,00)
Nilai Buku	43.005.543.988,00

Akumulasi

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap Rp0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
2	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp0,00

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tak Berwujud pada periode Semester I Tahun 2025.

Tabel 17. Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	-
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Amortisasi	-
Nilai Buku	-

C.3.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Lain-lain pada periode Semester I Tahun 2024.

Tabel 18. Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	-
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*Akumulasi**Penyusutan dan**Amortisasi Aset**Lainnya Rp.00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00 Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	-	(38.143.993.329,00)	-
2	Aset Lain-Lain	-	(16.689.110.268,00)	-
Jumlah		-	(54.833.103.597,00)	(54.833.103.597,00)

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp1.005.808.00
0,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.005.808.000,00 dan Rp22.605.289,00.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp995.808.000,
00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 995.808.000,00 dan Rp. 22.605.289,00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 20. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	995.808.000,00	uang titipan para pihak berperkara
2			
3			
4			
Jumlah		995.808.000,00	

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp0,00

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.107.967.604,00 dan Rp0,00.

C.4.3. Hibah yang Belum Disahkan
 Hibah yang Belum Disahkan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.dan Rp0,00.

C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka
 Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Saldo nihil karena telah dilakukan jurnal balik awal tahun.

C.4.5. Uang Muka dari KPPN
 Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.

C.5 Ekuitas
 Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp32.636.289,00 dan Rp22.605.289,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp355.231.500,00 dan Rp342.109.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 21. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	355.231.500,00	324.109.000,00	9,60
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		355.231.500,00	324.109.000,00	9,60
Total		355.231.500,00	324.109.000,00	9,60

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0,00 Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.252.077.142.540,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 22. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	5	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Beban Tunj. Anak PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Beban Tunj. Struktural PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
7	Beban Tunj. PPh PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
8	Beban Tunj. Beras PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Beban Uang Makan PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
10	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	0,00	0,00	#DIV/0!
11	Beban Tunjangan Umum PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
12	Bebas Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0,00	0,00	100,00
13	Beban Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	#DIV/0!
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	#DIV/0!
15	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	0,00	0,00	#DIV/0!
16	Beban Tunjangan Anak PPPK	0,00	0,00	#DIV/0!
17	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	#DIV/0!
18	Beban Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	#DIV/0!
19	Beban Uang Makan PPPK	0,00	0,00	100,00
20	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	#DIV/0!
21	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0,00	0,00	100,00
Total		0,00	0,00	#DIV/0!

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.958.000,00 dan Rp13.731.505,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada periode Semester I Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3.9%.

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	13.958.000,00	13.731.505,00	1,65
Total		13.958.000,00	13.731.505,00	1,65

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp37.127.350,00 dan Rp50.658.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 24. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	65.000,00	820.000,00	(92,07)
2	Beban Jasa Konsultan	37.062.350,00	36.038.000,00	2,84
3	Beban sewa	0,00	12.800.000,00	
4	Beban Jasa Lainnya	0,00	1.000.000,00	(100,00)
Total		37.127.350,00	50.658.000,00	(26,71)

Kenaikan beban barang dan jasa pada periode pelaporan Semester I Tahun 2024 sebesar 46,86% disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. peningkatan signifikan pada pos beban barang operasional lainnya akibat pembayaran dana operasional ;
2. peningkatan signifikan pada pos beban honor output kegiatan akibat pembayaran honorarium kelompok kerja; dan
3. peningkatan pada pos beban jasa konsultan akibat pembayaran jasa pendampingan pemutakhiran arsitektur dan peta rencana SPBE serta penyusunan pedoman dan SOP manajemen SPBE.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp.0,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan Dinas
Rp2.565.000,00.

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.565.000,00 dan Rp50.340.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	2.565.000,00	50.340.000,00	(94,90)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0,00	0,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0,00	0,00	-
6	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	-
Total		2.565.000,00	50.340.000,00	(94,90)

Terdapat penurunan beban perjalanan dinas pada periode pelaporan Semester I Tahun 2024 menurun sebesar 94.90%. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya frekuensi kegiatan perjalanan dinas pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp0,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Beban Penyusutan Jaringan	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	100,00
Jumlah Penyusutan		0,00	0,00	#DIV/0!
1	Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Amortisasi Lisensi	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	#DIV/0!
1	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00	#DIV/0!
Total		0,00	0,00	#DIV/0!

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih*Beban**Penyisihan**Piutang Tak**Tertagih**Rp0,00)*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 30 Juni 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0,00	0,00	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0,00	0,00	(100,00)
Total		0,00	0,00	(100,00)

D.9 Kegiatan Non Operasional*Kegiatan Non**Operasional**Rp0,00*

Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 28. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pelepasan Aset	0,00	0,00	100,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	#DIV/0!
1	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	0,00	100,00
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	0,00	100,00
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	0,00	100,00
4	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	0,00	100,00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0,00	0,00	#DIV/0!

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 30 Juni 2025 dan 2024.

0

DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.04

Data Pendukung Laporan Keuangan

Daftar Isi

LRA belanja dan Pengembalian Belanja Semester I TA 2025

Neraca Percobaan Basis Kas Saldo Awal I

Neraca Percobaan Basis Kas Berjalan Semester I TA 2025

Neraca Percobaan Basis Akrua Saldo Awal

Neraca Percobaan Basis Akrua Berjalan Semester I TA 2025

Neraca Face Semester Semester I TA 2025

Laporan Operasional Semester Semester I TA 2025

Laporan Perubahan Ekuitas Semester I TA 2025

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I TA 2025

Laporan Posisi BMN di Neraca Semester I TA 2025

Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel Semester I TA 2025

Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel Semester I TA 2025

Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Semester I TA 2025

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah Semester I TA 2025

Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset tak berwujud Semester I TA 2025

Laporan Barang Persediaan Semester Semester I TA 2025

Catatan Ringkas Barang Milik Negara Semester I TA 2025

Daftar Rekening Kementerian/Lembaga per I TA 2025

Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga per I TA 2025

Berita Acara Rekonsiliasi Internal per I TA 2024

Surat Hasil Rekonsiliasi I TA 2024

Rekening Koran per I TA 2024

Berita Acara Opname Fisik Persediaan Semester I TA 2024

Kertas Kerja Telaah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG 604731

Tgl Data : 30/06/25 7:09 AM
Tgl Cetak : 30/06/25 1:36 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
1								
A. Pendapatan Negara Dan Hibah								
I. Pendapatan Perpajakan								
1. Pajak Dalam Negeri								
2. Pajak Perdagangan Internasional								
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	736,611,000	355,231,500	(381,379,500)	48.23	876,309,000	342,109,000	(534,200,000)	39.04
1. Pendapatan Sumber Daya Alam								
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan								
3. Pendapatan BLU								
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	736,611,000	355,231,500	(381,379,500)	48.23	876,309,000	342,109,000	(534,200,000)	39.04
III. Pendapatan Hibah								
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	736,611,000	355,231,500	(381,379,500)	48.23	876,309,000	342,109,000	(534,200,000)	39.04
B. Belanja Negara								
I. Belanja Pemerintah Pusat	172,650,000	45,342,350	(127,307,650)	26.26	185,858,000	106,656,000	(79,202,000)	57.39
1. Belanja Pegawai								
2. Belanja Barang								
3. Belanja Modal								
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	172,650,000	45,342,350	(127,307,650)	26.26	185,858,000	106,656,000	(79,202,000)	57.39
5. Belanja Subsidi								
6. Belanja Hibah								
7. Belanja Bantuan Sosial								
8. Belanja Lain-lain								
II. Transfer ke Daerah								
1. Dana Bagi Hasil								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG 604731

Tgl Data : 30/06/25 7:09 AM
Tgl Cetak : 30/06/25 1:36 PM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	172,650,000	45,342,350	(127,307,650)	26.26	185,858,000	106,656,000	(79,202,000)	57.39
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Kepanjen 30 Juni 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP 198202052006041005

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 04	Ditjen Badan Peradilan Agama	Tanggal	: 30/06/25 1:48 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 0500	JAWA TIMUR	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	: 604731	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 30/06/25 8:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,200,000	65,000	0	65,000	5.42	1,135,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	1,200,000	65,000	0	65,000	5.42	1,135,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,560,000	1,840,000	0	0	0	0	1,840,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,560,000	1,840,000	0	0	0	0	1,840,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,650,000	5,650,000	5,650,000	0	5,650,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,650,000	5,650,000	5,650,000	0	5,650,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	100,000,000	100,000,000	37,062,350	0	37,062,350	37.06	62,937,650
522141	Belanja Sewa	4,280,000	12,840,000	0	0	0	0	12,840,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	400,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	104,680,000	114,040,000	37,062,350	0	37,062,350	32.5	76,977,650
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59,760,000	49,920,000	2,565,000	0	2,565,000	5.14	47,355,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	59,760,000	49,920,000	2,565,000	0	2,565,000	5.14	47,355,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	172,650,000	172,650,000	45,342,350	0	45,342,350	26.26	127,307,650
	JUMLAH BELANJA	172,650,000	172,650,000	45,342,350	0	45,342,350	26.26	127,307,650

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0500
SATUAN KERJA : 604731
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Agama
JAWA TIMUR
PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/06/25 1:48 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_salker_poc
Tgl Data : 30/6/25 8:22 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,200,000	65,000	0	65,000	5.42	1,135,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	1,200,000	65,000	0	65,000	5.42	1,135,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,560,000	1,840,000	0	0	0	0	1,840,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,560,000	1,840,000	0	0	0	0	1,840,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,650,000	5,650,000	5,650,000	0	5,650,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,650,000	5,650,000	5,650,000	0	5,650,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000	100,000,000	37,062,350	0	37,062,350	37.06	62,937,650
522141	Belanja Sewa	4,280,000	12,840,000	0	0	0	0	12,840,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	400,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	104,680,000	114,040,000	37,062,350	0	37,062,350	32.5	76,977,650
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59,760,000	49,920,000	2,565,000	0	2,565,000	5.14	47,355,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	59,760,000	49,920,000	2,565,000	0	2,565,000	5.14	47,355,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	172,650,000	172,650,000	45,342,350	0	45,342,350	26.26	127,307,650
	JUMLAH BELANJA	172,650,000	172,650,000	45,342,350	0	45,342,350	26.26	127,307,650

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
 WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
 SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 30/06/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/06/25 1:37 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	995,808,000	0	995,808,000	0.00
Persediaan	32,636,289	22,605,289	10,031,000	44.37
JUMLAH ASET LANCAR	1,038,444,289	22,605,289	1,015,839,000	4,493.81
JUMLAH ASET	1,038,444,289	22,605,289	1,015,839,000	4,493.81
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	995,808,000	0	995,808,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,005,808,000	0	1,005,808,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	1,005,808,000	0	1,005,808,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	32,636,289	22,605,289	10,031,000	44.37
JUMLAH EKUITAS	32,636,289	22,605,289	10,031,000	44.37
JUMLAH EKUITAS	32,636,289	22,605,289	10,031,000	44.37
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,038,444,289	22,605,289	1,015,839,000	4,493.81

Keterangan :

FINAL

Kepanjen, 30 Juni 2025
 Penanggung-jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HP.
 NIP 198202052006041005

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 30/06/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/06/25 1:36 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	355,231,500	342,109,000	13,122,500	3.836
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	355,231,500	342,109,000	13,122,500	3.836
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	355,231,500	342,109,000	13,122,500	3.836
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	13,958,000	13,731,505	226,495	1.649
Beban Barang dan Jasa	37,127,350	50,658,000	(13,530,650)	(26.71)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	2,565,000	50,340,000	(47,775,000)	(94.905)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 30/06/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/06/25 1:36 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	53,650,350	114,729,505	(61,079,155)	(53.238)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	301,581,150	227,379,495	74,201,655	32.633
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	301,581,150	227,379,495	74,201,655	32.633
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	301,581,150	227,379,495	74,201,655	32.633

Keterangan :

FINAL



Kepanjen, 30 Juni 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HP.
NIP 198202052006041005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

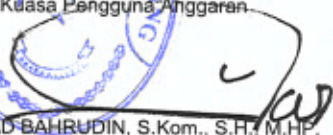


KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 30/06/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 30/06/25 1:36 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	22,605,289	18,774,048	3,831,241	20.41
SURPLUS/DEFISIT-LO	301,581,150	227,379,495	74,201,655	32.63
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(291,550,150)	(212,476,061)	(79,074,089)	37.22
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10,031,000	14,903,434	(4,872,434)	(32.69)
EKUITAS AKHIR	32,636,289	33,677,482	(1,041,193)	(3.09)

Keterangan :
FINAL

Kepanjen, 30 Juni 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HF.
NIP 198202052006041005

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

UNIT ORGANISASI : 04

WILAYAH/PROVINSI : 0500

SATUAN KERJA : 604731

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Agama

JAWA TIMUR

PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl. Cetak 30/06/2025 1:46 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	22,605,289	0
0.0	391111	Ekuitas	0	22,605,289
JUMLAH			22,605,289	22,605,289

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 30/06/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/06/25 1:37 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	995,808,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	32,636,289	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	995,808,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	10,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	45,342,350
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	355,231,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	18,339,000
0.0	391111	Ekuitas	0	22,605,289
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	6,840,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	127,415,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	220,976,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	65,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	37,062,350	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,565,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	13,958,000	0
JUMLAH			1,447,326,139	1,447,326,139

Keterangan :

FINAL

Kepanjen, 30 Juni 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HP.
 NIP 198202052006041005

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (604731) PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 30/06/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 30/06/25 1:37 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	45,342,350
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	355,231,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	6,840,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	127,415,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	220,976,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	65,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,650,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	37,062,350	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,565,000	0
JUMLAH			400,573,850	400,573,850

Keterangan :

FINAL

Kepanjen, 30 Juni 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguru Anggaran

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.HP.
198202052006041005

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 604731 PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG

Tgl Data : 31/06/25 12:29 PM
Tanggal : 31/06/25 3:11 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301006	Ordner Dan Map	748,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	21,000
1010302002	Berbagai Kertas	706,000
1010302004	Amplop	33,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	548,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	1,260,000
1010309001	Meterai	440,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28,880,289
Jumlah Barang Konsumsi		32,636,289
TOTAL		32,636,289

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

*Jl. Raya Mojokari No. 77, Desa Mojokari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com*

**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN DIPA 005.04
Nomor : 1685/SEK.PA.W13-A35/PL1.2.7/VI/2025**

Nama Satker : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Kode Satker : 604731
UAPPB-W : (0500) Jawa Timur
UAPPB-E1 : (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
UAPB : Mahkamah Agung R.I.

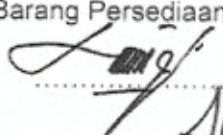
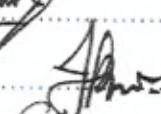
Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : Buyung Tumanggor, S.Kom.
NIP : 19750404.200912.1.002
Jabatan : Ketua
2. Nama : Hera Nurdiana, S.H
NIP : 19781009.201408.2.002
Jabatan : Sekretaris
1. Nama : Nabila Ghina Nugraha, A.Md
NIP : 19971118.2025062.010
Jabatan : Anggota

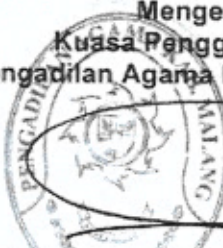
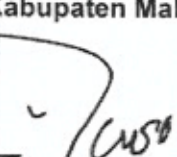
Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik persediaan Semester I Tahun 2025 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1. Buyung Tumanggor, S.Kom. 
2. Hera Nurdiana, S.H 
3. Nabila Ghina Nugraha, A.Md 

**Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang**



**Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP.
NIP. 198202052006041005**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

*Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com*

**HASIL OPNAME FISIK DIPA 005.01
Nomor: 1685/SEK.PA.W13-A35/PL1.2.7/VI/2025**

Nama Satker : Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Kode Satker : 604731
UAPPB-W : (0500) Jawa Timur
UAPPB-E1 : (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
UAPB : Mahkamah Agung R.I.

No.	Nama Barang	Kode Barang	Satuan	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
				Saldo SAKTI	Hasil Fisik		Baik	Usang	Rusak
1.	Map Salput	1010301006000 002	Pack	124	124	0	V	-	-
2.	Map Gugatan	1010301006000 003	Pack	44	44	0	V	-	-
3.	Benang Minutasi	1010301999000 003	Buah	7	7	0	V	-	-
4.	Kertas A4	1010302002000 001	Rim	12	12	0	V	-	-
5.	Stiker Logo	1010302002000 002	Buah	44	44	0	V	-	-
6.	Amplop Dinas	1010302004000 001	Buah	132	132	0	V	-	-
7.	Tinta Printer	1010304004000 001	Buah	8	8	0	V	-	-
8.	Materai	1010309001000 001	Buah	44	44	0	V	-	-
9.	Register Induk Perkara Gugatan	1 0103999990000 01	Buku	40	40	0	V	-	-
10.	Register Induk Perkara Permohonan Volunteer	1010399999000 002	Buku	31	31	0	V	-	-
11.	Register Surat Kuasa Khusus	1010399999000 008	Buku	3	3	0	V	-	-
12.	Register Akta Cerai	1010399999000 010	Buku	8	8	0	V	-	-
13.	Buku Hak-hak Kepaniteraan (PNBP)	1010399999000 019	Buku	1	1	0	V	-	-
14.	Buku Hak-hak Kepaniteraan Lainnya	1010399999000 020	Buku	1	1	0	V	-	-
15.	Formulir Akta Cerai	1010399999000 022	Buku	61	61	0	V	-	-
16.	Blangko Akta Cerai	1010399999000 023	Buku	75	75	0	V	-	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

*Jl. Raya Mojokari No. 77, Desa Mojokari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com*



**Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang**


**Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP.
NIP. 198202052006041005**



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG (604731)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILAG O (032901xxxxx303)
Virtual Account : 651546047311000 | BPG 032 PA KAB MALANG
Periode : 01-06-2025 s.d 30-06-2025

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-06-30	08:50:58	40841521	From 032901003295305 to 651546047311000 SETORAN_65154_6047311000 259991310137814000001 dari 032901003295305	0,00	0,00	8.333.000,00	8.333.000,00	SPAN	
2025-06-30	11:34:40	40854005	ganti uang persediaan	8.333.000,00	8.333.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
Total Mutasi					8.333.000,00	8.333.000,00			
Saldo Akhir							0,00		